



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Sosial RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 17 Mei 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembahasan Pengaturan Kelembagaan dan Anggaran dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana
Ketua Rapat	: H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., dan Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

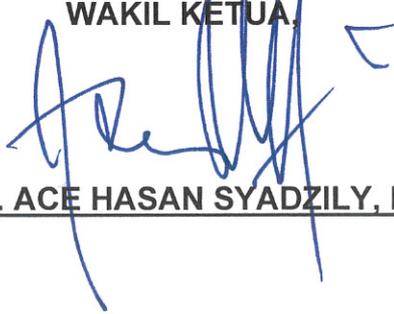
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI mengenai “Pembahasan Pengaturan Kelembagaan dan Anggaran dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana” dapat dicatat sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI sepakat untuk memperkuat posisi kelembagaan BNPB dalam RUU tentang Penanggulangan Bencana.
2. Komisi VIII DPR RI memberikan kesempatan kepada Menteri Sosial sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Panja dan sekaligus memohon arahan dari Presiden RI mengenai kebijakan kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penanggulangan Bencana.
3. Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial RI untuk mengakomodir berbagai jenis bencana seperti bencana sosial dalam DIM RUU tentang Penanggulangan Bencana.
4. Komisi VIII DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk memperkuat kewenangan dari Kementerian/Lembaga terkait dalam RUU Penanggulangan Bencana agar tidak tumpang tindih dan terkoordinasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.05 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA.**


H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si